

Feminisasi Kemiskinan

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengungkap bahwa dari 1,3 miliar warga dunia yang miskin, 70 % di antaranya adalah kaum perempuan¹. Data lain juga menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin di Indonesia adalah perempuan². Saat ini, kemiskinan sudah menjadi sumber dan sekaligus akibat dari kemiskinan, yang pada gilirannya telah menciptakan lingkaran setan di kalangan perempuan di Indonesia. Dalam tabel 1 itu tergambar bahwa data tentang pendidikan, jenis pekerjaan, upah, dan kesempatan kerja pada perempuan lebih memprihatinkan dibanding laki-laki³.

Tabel 1: Beberapa Fakta Kemiskinan Perempuan di Indonesia

No.		Perempuan (Muda)	Laki-laki (Muda)	Sumber dan Tahun
1.	Pendidikan			
	Kaum muda yang tidak (tidak tamat) sekolah dasar	11,9%	5,34%	Susenas 2002
2.	Tingkat buta-huruf	12,69%	5,85%	Susenas 2002
3.	Jenis Pekerjaan			
	Persentase pekerja yang tidak dibayar	35,6%	10,8%	1999
4.	Pekerja di sektor informal	68,3%	59,9%	1999
5.	Upah			
	Upah yang tidak tamat sekolah dasar	Rp. 124.232	Rp. 231.061	1999
	Upah yang tamat sekolah dasar	Rp. 161.112	Rp. 277.817	1999
	Upah yang tamat sekolah menengah pertama	Rp. 214.100	Rp. 334.800	1999
	Upah yang tamat sekolah menengah atas	Rp. 367.900	Rp. 468.600	1999
	Upah yang tamat akademi	Rp. 599.000	Rp. 695.500	1999
9.	Upah yang tamat universitas	Rp. 573.200	Rp. 769.600	1999
	Kesempatan Kerja			
11.	Tingkat Pengangguran	7,5%	5,8%	1999
12.	Tingkat Setengah Pengangguran	24,9%	12,5%	1999

Sumber : Profil Jender Indonesia : draf, 21 April 2003)

Kondisi di atas menguatkan adanya feminisasi kemiskinan di Indonesia. Feminisasi kemiskinan adalah sebuah kenyataan bahwa sebagian besar angka kemiskinan dialami oleh kaum perempuan. Sulitnya perempuan mendapatkan sarana dan kesempatan yang setara untuk hidup layak mengakibatkan terpinggirkannya hak sosial ekonomi perempuan. Selain itu, nilai-nilai sosial yang berlaku di banyak masyarakat, antara lain berupa pernikahan di usia muda, keharusan segera memiliki anak, kehamilan berkali-kali untuk memperoleh anak laki-laki, dan jam kerja yang panjang di rumah juga mengakibatkan terbatasnya akses perempuan ke pelayanan umum dan upaya meningkatkan ekonominya^{2,3}.

G-HELP (Gender Health Environment Linkages Program), merupakan kolaborasi antara Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dengan 14 Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Kesehatan Reproduksi serta Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan yang mendapatkan dukungan dari Ford Foundation. Tujuan dari program ini adalah untuk menjembatani hubungan yang dinamis antara isu gender, kesehatan reproduksi dan keadilan lingkungan di masyarakat dalam rangka mempercepat pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

MITRA KERJA Yayasan Rifka Annisa, Yayasan Mitra Aksi, Yayasan Bina Usaha Lingkungan-GEF SGP, Java Learning Center, Warung Informasi Konservasi, Yayasan Fatayat NU, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Konsorsium Nasional Untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia, Yayasan RAHIMA, Yayasan Hotline Surabaya, Yayasan Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi, Yayasan Masyarakat Tertinggal Riau, Yayasan Talenta, Yayasan Duta Awam, RMI-The Indonesian Institute for Forest and Environment.

TIM G-HELP Budi Utomo, Purwa Kurnia Suahya, Dini Dachlia, Luluk Ishardini, Dwiastuti Yunita Saputri, Nurul Huriyah Astuti, Linda Widiyanti, M.Arafat Patria

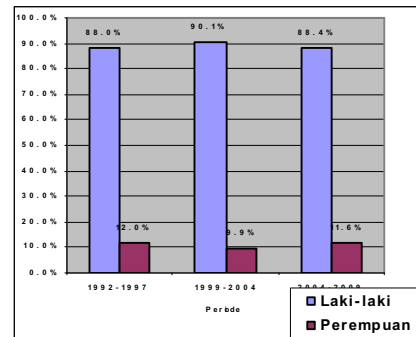
Peran Publik Perempuan dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan

Keberhasilan upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah kemiskinan pada perempuan tidaklah bisa dicapai hanya dengan program anti kemiskinan². Hal ini terjadi karena ada hambatan struktural yang mengakibatkan akses perempuan terbatas, salah satunya adalah relasi gender yang tidak adil dan tidak setara akibat budaya yang paternalistik¹. Selain itu, struktur budaya paternalistik juga melahirkan keterbatasan perempuan dalam pengambilan keputusan baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Di ranah publik, jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural di legislatif sejak 1992 - 2009 (gambar 1) juga minim.

Untuk mengentaskan kemiskinan, program anti kemiskinan harus disertai dengan program-program yang bertujuan menghapus nilai-nilai sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Perempuan harus dilibatkan dalam kedudukan yang setara dalam merumuskan kebijakan¹. Salah satunya diantaranya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan dalam pengambilan keputusan di legislatif.

Gambar 1

Proporsi Perempuan dalam Lembaga-Lembaga Publik Melalui Lembaga Legislatif di Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam 3 Periode Berjalan Tahun 1992-2009



Sumber : KPU, 2005

Oleh karena itu, tindakan *affirmative action*, yaitu kuota 30 % untuk keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia harus didukung oleh semua pihak. (Nurul HA).

Referensi :

- Arjani, Ni Luh, Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki, <http://www.ejournal.unud.ac.id/abstrak/feminisasi%20kemiskinan%20%20dalam%20%20kultur%20patriarki.doc>, accessed 10 May 2008
- International Labour Organization (ILO), 2004, Jender dan Kemiskinan, www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/nletter04.pdf, accessed 10 Mei 2008
- Sari, Dita Indah, Bangsa Kuli dan Feminisme Kemiskinan, Media Indonesia, Kamis, 09 Juni 2005, also available at <http://www.mail-archive.com/indomarxist@yahoo.com/msg00246.html>, accessed 10 May 2008

CONTACT

Pusat Penelitian Kesehatan UI.
Ged-G,R.211.Fak.Kesehatan Masyarakat.
Kampus UI Depok,16424.
Telp : 021-7270154
Fax : 021-7270153
Website : www.g-help.or.id
Email : chruui@ui.edu

